



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 12 Mei 2011

Halaman: 22

PNS Harus Netral

Yulianingsih

Dibentuk tim pengawas pegawai negeri sipil dalam Pemilukada.

YOGYAKARTA — Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak main-main dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot setempat. Menyusul akan digelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) September 2011 mendatang.

Inspektorat bahkan mengancam akan memecat para PNS yang terbukti terlibat dalam Pemilukada tersebut. "Kita tidak main-main, karena aturannya sudah jelas. Terbukti terlibat sanksi berat akan kita berikan hingga ranah pemecatan," terang Kepala Inspektorat Pemkot Yogyakarta, Wahyu Widayat, Rabu (11/5). Menurutnya, aturan terkait la-

rangan PNS untuk terlibat dalam Pemilukada terpapar jelas melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Larangan tersebut setidaknya ada pada pasal 4 angka 14 dan 15 PP Nomor 53 Tahun 2010.

Menurut Wahyu, pada angka 14 Pasal 4 dinyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon wali dan wakil wali kota dengan memberikan surat dukungan atau fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya. Sedangkan pada angka 15 pasal yang sama dikatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon wali dan wakil wali kota dalam kegiatan kampanye, atau menggunakan fasilitas jabatan untuk kampanye, dan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Sanksi yang diatur juga mulai dari penurunan pangkat dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun hingga sanksi berat berupa pemecatan. Pemecatan bisa dilakukan

jika seluruh aturan tersebut terbukti dilanggar oleh PNS yang bersangkutan," tambahnya.

Diakuinya, Pemilukada Kota Yogyakarta sudah masuk tahap pencalonan calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Karenanya, dalam waktu dekat ini kata dia, pihaknya akan membentuk tim pengawasan khusus untuk memantau seluruh gerak PNS di Kota Yogyakarta terutama yang disinyalir ikut terlibat dalam Pemilukada tersebut.

Terkait dengan rencana salah satu calon yaitu Ahmad Hanafi Rais yang akan menggandeng salah satu pejabat birokrat di lingkungan Pemkot setempat, Wahyu mengatakan pihaknya masih akan menunggu dan menelaah hal tersebut. Sebab hingga saat ini siapa pasangan Hanafi yang disebut sebagai birokrat itu belum juga diumumkan. "Itu belum pasti. Kami akan tunggu sampai ada kelanjutannya," tambahnya.

Terpisah, anggota anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Sunadi mengatakan, apa-

bila Wakil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti ingin melaksanakan kampanye pada Pemilukada, maka harus mengajukan cuti selama dua pekan.

Itu harus dilakukan karena kata dia, Haryadi adalah salah satu calon kepala daerah yang akan maju dalam Pemilukada Kota Yogyakarta berpasangan dengan Imam Priyono dan diusung melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). "Pada dasarnya, wali kota dan wakil wali kota tidak dapat dikategorikan PNS, itu adalah jabatan politik. Tetapi mereka tetap harus mengajukan cuti selama mengikuti kampanye," terangnya.

Sementara Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta memperkirakan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tersebut terkait langkah dalam Pemilukada akan turun dalam pekan ini. "Kami perkiraan, dalam tiga hari mendatang, sudah ada keputusan," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DFC) Partai Gerindra Kota Yogyakarta, Anton Prabu Semendawai. ■ est: heri purwata

Dihatirkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Termbusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Inspektorat	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. Panwaslu	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3. KPU	<input type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005